



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



Bersih Melayani
Memberi Solusi

LAPORAN KINERJA 2023

INSPEKTORAT JENDERAL



KEMENTERIAN
LINGKUNGAN HIDUP
DAN KEHUTANAN



Bersih Melayani
Memberi Solusi

LAPORAN KINERJA 2023 INSPEKTORAT JENDERAL



LINI MASA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

JANUARI

- Penandatanganan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 lingkup Inspektorat Jenderal;
- Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahun 2023;
- Ditetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SPIP lingkup KLHK
- Pendampingan Pemeriksaan Laporan Keuangan KLHK Tahun 2022 oleh BPK RI di 10 Provinsi



- *Capacity Building* Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi lingkup Inspektorat Jenderal;
- Sosialisasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
- Sharing Session Peningkatan Kualitas Pengawasan Intern dengan Inspektorat Sekretariat Jenderal DPD RI
- Monitoring Pelaporan LHKPN dan LHKASN

MARET

- Webinar “*Better Speaker for Better Future* (Membangun Branding Organisasi Melalui Komunikasi)”
- Webinar “Semua Peduli, Semua Terlindungi. Perlindungan *Privacy* serta Keselamatan Perempuan dan Anak”
- Itjen Healthy Day
- *Benchmarking* dengan Inspektorat Kota Tasikmalaya
- Webinar “*Health Talk : Get Healthy is So Easy*”
- *Benchmarking* Pembangunan Zona Integritas bersama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia



FEBRUARI

LINI MASA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

MEI



- Bimbingan Teknis Pengarusutamaan Gender
- Ditetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko
- Webinar “Bangun *Public Trust* melalui Integritas dan Profesionalitas Pelaku PBJ”
- Penandatanganan Nota Kesepahaman Inspektorat Jenderal KLHK dengan Yayasan Pendidikan Internal Audit (YPIA)
- Pelantikan Inspektur Wilayah IV dan Inspektur Investigasi

- Proby Audit Pengadaan Barang/Jasa
- Rapat Koordinasi Pengawasan Lingkup KLHK
- Sosialisasi Peraturan Menteri LHK No 1 dan Nomor 5 Tahun 2023
- Sharing Session dengan Inspektorat Badan Informasi Geospasial
- Inspektur Jenderal KLHK meraih Sertifikasi Ahli Pembangun Integritas (API) Eksekutif dari Lembaga Sertifikasi Profesi KPK
- Ditetapkan Peraturan Menteri LHK Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengawasan Intern



- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Menteri LHK Nomor 1 dan Nomor 5 Tahun 2023
- Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP lingkup KLHK tahun 2023.
- Penjaminan kualitas atas hasil Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi KLHK Tahun 2023.
- Inspektorat Jenderal KLHK berpartisipasi pada Expo Pengawasan Intern yang diselenggarakan BPKP
- Webinar “Mitigasi dan Deteksi Risiko *Fraud PBJ*”

APRIL

JUNI

LINI MASA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

JULI

- Sosialisasi anti korupsi pada Satker KLHK di 6 Provinsi
- Webinar “Transformer : Lahirnya pejabat Fungsional Agile dan Adaptif (Aktualisasi dalam Manajemen Risiko Organisasi)”



- Pendampingan Penyusunan RPI Tahun 2024
- Itjen Healthy Day “Mengulik Spirit ASN menuju Indonesia Maju (*Beyond Call of Duty*)”
- Webinar INSIGHT “INSpirasi Gaya Hidup berinTegritas”
- Benchmarking Identifikasi Kebutuhan Sarana Pendukung Pelatihan Pengawasan APIP bersama BPKP
- Supervisi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu

SEPTEMBER

- Audit Tematik Rehabilitasi Hutan dan Lahan
- Sosialisasi Anti Korupsi pada 5 SMK Kehutanan Negeri
- Rekrutmen Auditor Inspektorat Jenderal KLHK melalui mekanisme perpindahan dari Unit Eselon I KLHK
- Inspektorat Jenderal berpartisipasi dalam Festival LIKE Kementerian LHK
- Ditetapkan Peraturan Menteri LHK nomor 12 tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Aparatur Sipil Negara



AGUSTUS

LINI MASA INSPEKTORAT JENDERAL TAHUN 2023

NOVEMBER



- Audit Tematik Perizinan dan Persetujuan Bidang LHK
- Audit Tematik Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Bimbingan Teknis Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Satker KLHK
- Webinar "Lapor Bukan Sembarang(an) Lapor (Jangan Ada Dusta di LHKPN Kita).
- Mendampingi Wakil Menteri LHK menerima Tim United Nation of Auditors (UNBOA)

- Reviu RPI Satker KLHK Tahun 2024
- Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Inspektur Jenderal KLHK dengan Anggota Ombudsman RI tentang Sinergi Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- *Capacity Building* Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM



- Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Tahun 2023
- 3 Satker KLHK memperoleh predikat WBK oleh Kementerian PAN dan RB
- Booth KLHK meraih predikat 10 booth Terbaik pada Integrity Expo Hakordia Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh KPK

OKTOBER

DESEMBER



KATA PENGANTAR



KATA PENGANTAR INSPEKTUR JENDERAL KLHK

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2023 dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka good governance dan clean government Inspektorat Jenderal. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini menyajikan analisis capaian kinerja untuk sasaran-sasaran strategis di Inspektorat Jenderal, sekaligus sebagai bahan untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Dengan Laporan Kinerja ini, diharapkan adanya optimalisasi meningkatkan efisiensi, efektivitas dan produktivitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun-tahun selanjutnya.

Semoga laporan pertanggungjawaban ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik pada tahun mendatang.

Jakarta, 24 Januari 2024

Inspektur Jenderal,



Ir. Laksmi Wiyanti, M.CP., CGCAE., QIA., CEIO
NIP. 19690205 199303 2 001

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN 01

- A. Latar Belakang 1
- B. Struktur Organisasi 2
- C. Sumber Daya Manusia 4

02 PERENCANAAN

- A. Rencana Strategis
Kementerian LHK Tahun
2020 - 2024 5
- B. Rencana Kerja 8
- C. Perjanjian Kinerja 9



Panorama Kawah Ijen, Jawa Timur



AKUNTABILITAS KINERJA

03

A. Capaian Kinerja	11
B. Kegiatan Strategis Inspektorat Jenderal	21
C. Realisasi Anggaran	37

04

PENUTUP

Simpulan

39



*Arahan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam
acara Rakorwas 2023*

PENDAHULUAN



#BersihMelayaniMemberiSolusi

BAB I PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KLHK sebagaimana tercantum pada Permenlhk nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja KLHK. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

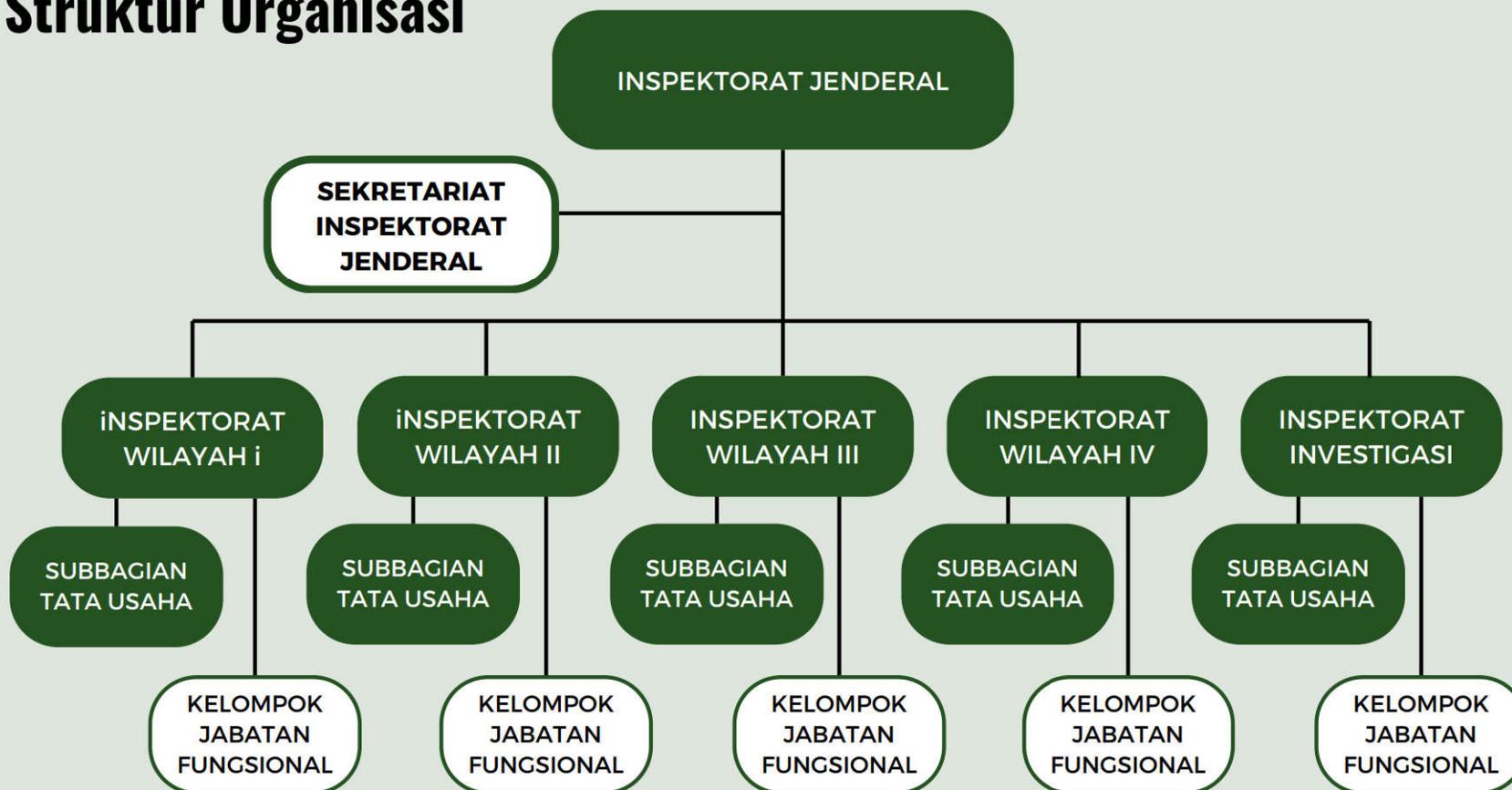
1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan KLHK
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KLHK terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawsan lainnya
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan KLHK
5. Pelaksanaan tugas administrasi Inspektorat Jenderal
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Salah satu perwujudan peran Inspektorat Jenderal sebagai pengawas internal atau APIP yaitu menjadi APIP yang efektif dalam memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi serta mampu merespon berbagai perubahan serta isu-isu strategis yang akan mempengaruhi sekaligus mengawal pencapaian sasaran strategis Kementerian LHK. Disamping itu juga APIP harus mampu memberikan praktik-praktif profesional terbaiknya agar hasil pengawasan dapat dirasakan dan memberikan kontribusi positif bagi organisasi. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Jenderal KLHK sebagai unsur penyelenggara pemerintah yaitu menyusun Laporan Kinerja (LKj). Laporan kinerja inspektorat jenderal disusun berpedoman pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 54,

berdasarkan pada Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan antara Inspektur Jenderal dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ruang lingkup laporan kinerja Inspektorat Jenderal meliputi target dan capaian, realisasi anggaran, efisiensi kinerja, keberhasilan dan kendala yang dihadapi juga langkah yang akan ditempuh dimasa mendatang. Tujuan laporan penyajian laporan kinerja Inspektorat Jenderal menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja inspektorat jenderal berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan suatu simpulan yang menjadi bahan masukan dan referensi dalam menetapkan kebijakan dan strategi tahun berikutnya. Selanjutnya diharapkan laporan kinerja inspektorat jenderal bisa menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun sasaran strategis berikutnya.



B. Struktur Organisasi



TUGAS POKOK DAN FUNGSI

- **Sekretariat Inspektorat Jenderal**, melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Inspektorat Jenderal.
- **Inspektorat Wilayah I**, melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit kerja Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.
- **Inspektorat Wilayah II**, melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada unit-unit Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- **Inspektorat Wilayah III**, melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
- **Inspektorat Wilayah IV**, melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja, keuangan, dan administrasi melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya, pengawasan untuk tujuan tertentu termasuk pendanaan dekonsentrasi, tugas pembantuan dan dana alokasi khusus atas tugas pembantuan dan dana alokasi khusus pada Unit Kerja Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara
- **Inspektorat Investigasi**, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktek-praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindak lanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri, dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal.

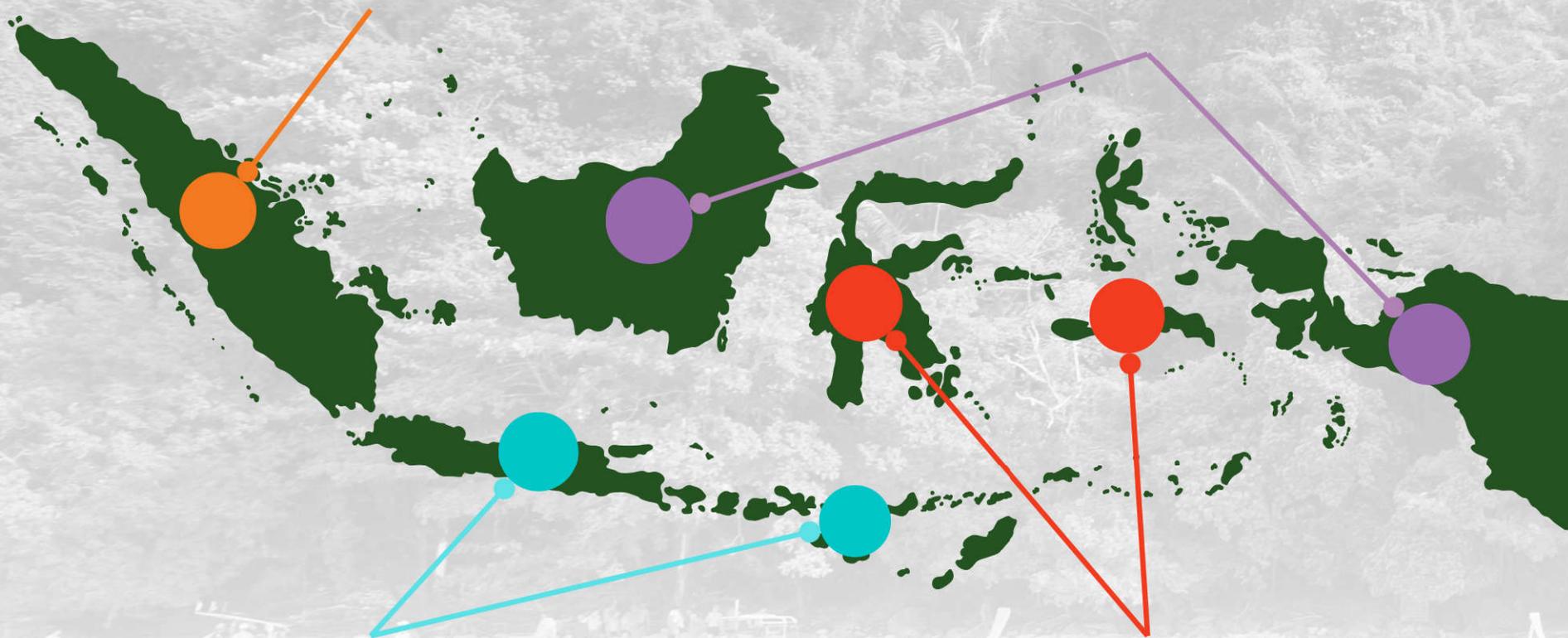
WILAYAH KERJA INSPEKTORAT JENDERAL

Inspektorat Wilayah I

Wilayah Kerja : Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, dan Pusat Pembangunan Ekoregion Sumatera serta instansi lingkungan hidup dan Kehutanan di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu, Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Lampung.

Inspektorat Wilayah III

Wilayah Kerja : Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Papua, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Tengah, Provinsi Kalimantan Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.



Inspektorat Wilayah II

Wilayah Kerja : Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung, Direktorat Jenderal perhutanan Sosial dan Kemitraan lingkungan, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa dan Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Bali Nusa Tenggara serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Banten, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi DI Jogjakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Inspektorat Wilayah IV

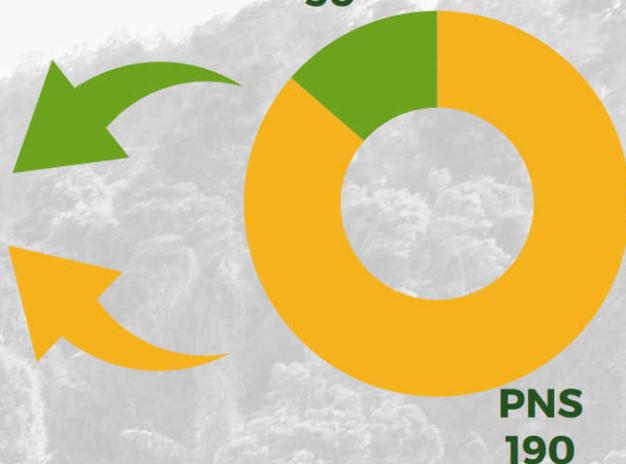
Wilayah Kerja : Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim, instansi di lingkungan Kementerian LHK yang menerapkan Badan Layanan Umum, Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi dan Maluku, serta instansi lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Maluku, dan Provinsi Maluku Utara

C. Sumber Daya Manusia



220
Orang
Pegawai

PPNPN
30



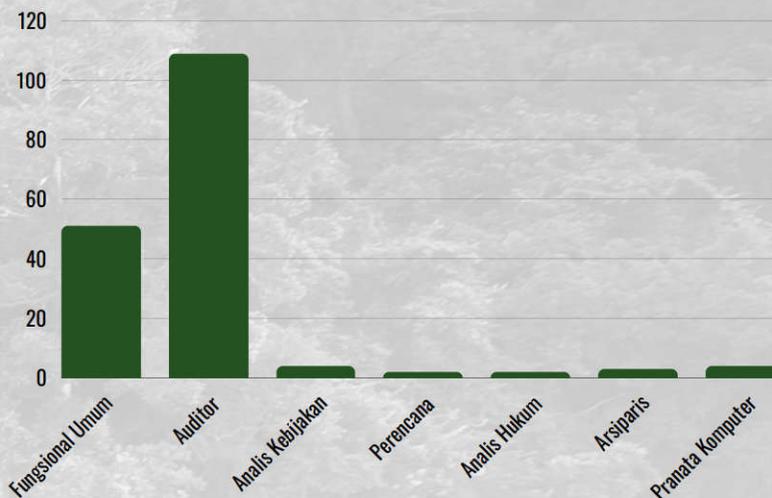
PNS
190

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsinya Inspektorat Jenderal didukung oleh 220 orang pegawai yang terdiri dari 190 Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 30 orang Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Adapun komposisi pegawai terdiri dari Pejabat Struktural 15 orang, Jabatan fungsional auditor 109 orang, Jabatan Fungsional Umum 51 orang, Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan 4 orang, Jabatan Fungsional Perencana 2 orang, Jabatan Fungsional Analisis Hukum 2 orang, Jabatan Fungsional Arsiparis 3 orang, dan Jabatan Fungsional Pranata Komputer 4 orang.

KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

15
orang

Pejabat Struktural
Eselon I s.d. Eselon IV



	Setitjen	Itwil I	Itwil II	Itwil III	Itwil IV	Itves
Pejabat Struktural	5	2	2	2	2	2
Fungsional Umum	28	4	4	5	7	3
Fungsional Auditor	-	20	23	24	22	14
Fungsional Analisis Kebijakan	4	-	-	-	-	-
Fungsional Perencana	2	-	-	-	-	-
Fungsional Analisis Hukum	2	-	-	-	-	-
Fungsional Arsiparis	3	-	-	-	-	-
Fungsional Pranata Komputer	4	-	-	-	-	-



Bersih Malaysia
Memberi Solusi

SETALI 3 PERAN

melalui
**NEW SPIP &
MANAJEMEN RISIKO**

Presented by Inspektorat Jenderal KLHK
2023

ISSN 2988-2672

kriteria
Volume 1, Nomor 1, Agustus 2023

”
TRANSFORMASI
DIBUTUHKAN
KARENA ADANYA
PERUBAHAN
YANG CEPAT

TRANSFORMASI

Apun month go id

Pembagian Cinder Hati berupa Majalah Pengawasan "Kriteria" dan Buku "Setali 3 Peran" kepada pengunjung ekspo di acara Festival LIKE

PERENCANAAN



#BersihMelayaniMemberiSolusi

BAB II PERENCANAAN

A. Rencana Strategis Kementerian LHK Tahun 2020 - 2024

Dalam mendukung Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian LHK, maka Inspektorat Jenderal menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

VISI & MISI INSPEKTORAT JENDERAL



Menjadi pengawas intern yang kapabel dan berintegritas untuk mewujudkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan.

1. Mewujudkan penerapan tata kelola (*governance*), Pengelolaan Risiko (*Risk Management*), dan Pengendalian (*Control*) lingkup KLHK;
2. Mendorong penguatan integritas dan pengendalian praktek KKN;
3. Meningkatkan kapabilitas pengawasan intern yang berintegritas, kompeten dan profesional



SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Jenderal, serta mendukung tujuan Kementerian LHK dalam meningkatkan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, maka Inspektorat Jenderal menetapkan tujuannya yaitu terwujudnya pengawasan yang memberi nilai tambah untuk memastikan pencapaian tujuan Kementerian LHK dengan sasaran strategis meningkatkan pengawasan dan pengendalian internal.

Untuk mengukur capaian Sasaran strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan indikator kinerja utama sasaran strategis Inspektorat Jenderal yaitu :

Sasaran yang telah ditetapkan merupakan kondisi yang akan dicapai selama periode lima tahun yang akan datang sebagai akibat yang ditimbulkan oleh adanya hasil/dampak (*outcome/impact*) dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup Inspektorat Jenderal KLHK. Perubahan revisi renstra bertujuan untuk memperbaiki *cascading* sasaran dan indikator sasaran.

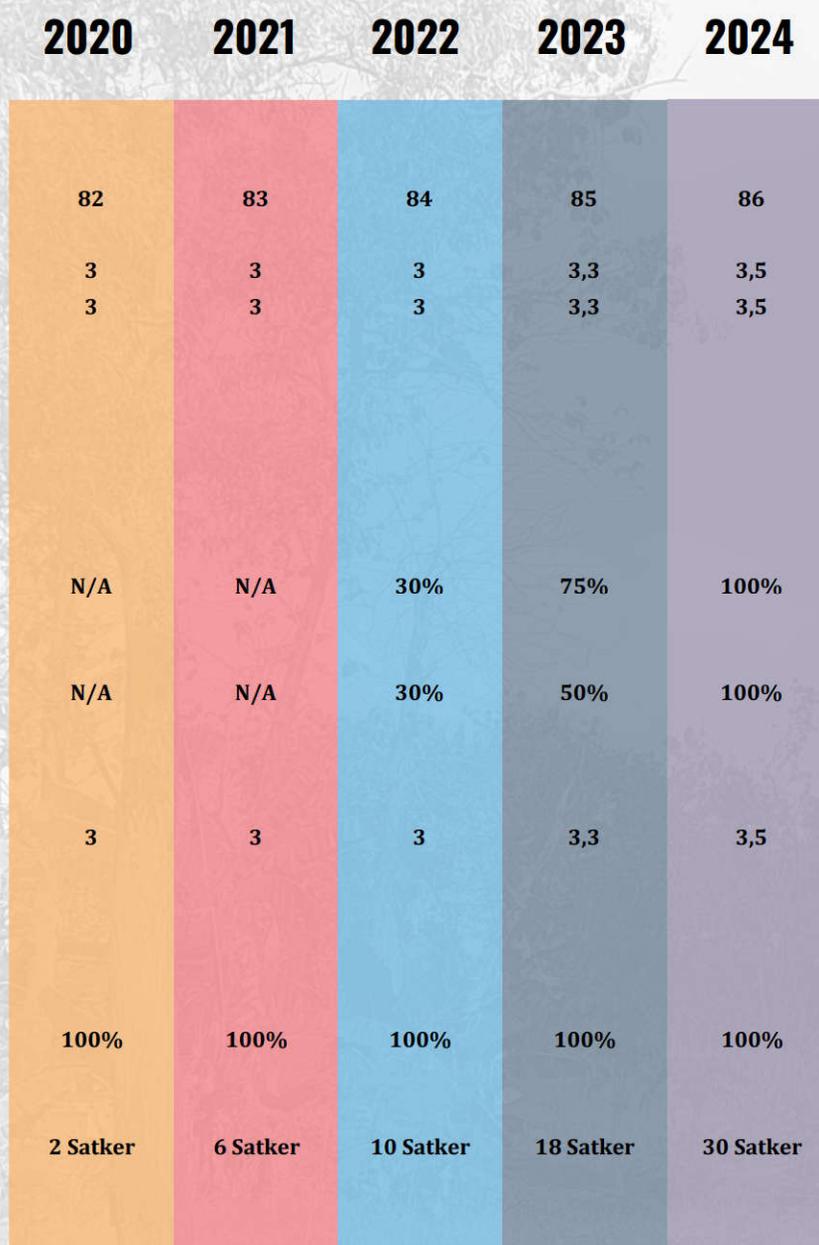
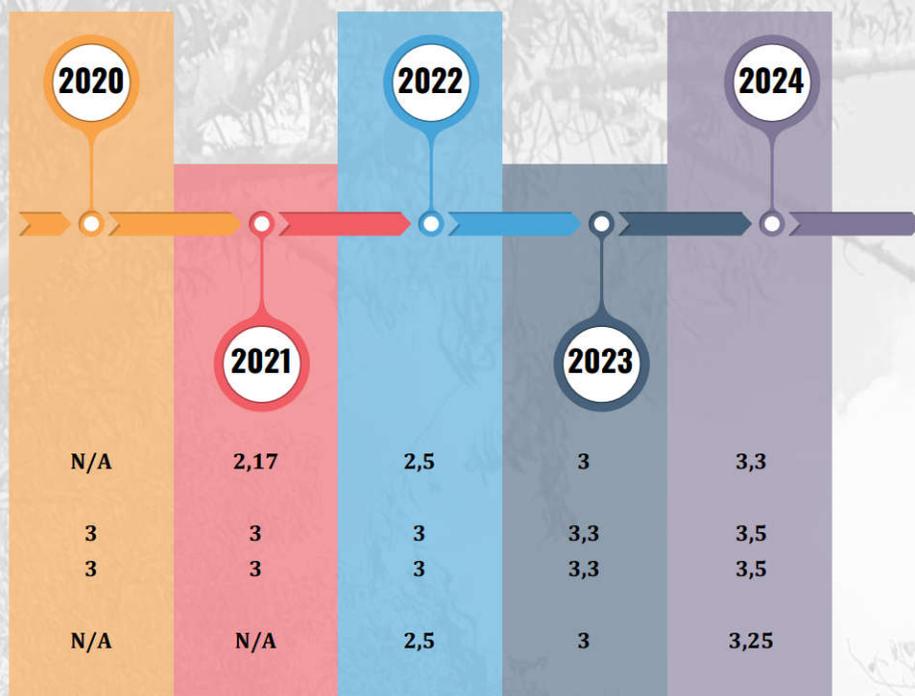
- MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) KLHK
- NILAI MATURITAS SPIP KLHK
- INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) KLHK
- NILAI KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KLHK

IKU (INDIKATOR KINERJA UTAMA) DAN IKK (INDIKATOR KINERJA KEGIATAN) INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam Rencana Strategis 2020 - 2024 (Revisi)

No	Program / Sasaran Program	Indikator Kinerja Utama
Program : Dukungan Manajemen		
IKU 1	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal	• Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK
IKU 2		• Nilai Maturitas SPIP KLHK
IKU 3		• Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah
IKU 4		• Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK

No	Kegiatan / Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
Kegiatan : Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK (SETITJEN)		
IKK 1	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan public yang agile, efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	• Nilai Implementasi SAKIP pada Itjen
IKK 2		• Nilai Maturitas SPIP pada Itjen
IKK 3		• Nilai Pengelolaan SDM, Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja, Budaya dan Hubungan Organisasi, Struktur Tata Kelola pada Kapabilitas APIP
Kegiatan : Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK (ITWIL I, II, III, IV)		
IKK 4	Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkp KLHK	• Persentase unit kerja yang nilai MRI nya 3,3
IKK 5	Meningkatnya kualitas pengendalian intern (first lines of defense) pada tingkat satuan kerja	• Persentase unit kerja yang nilai maturitas SPIP nya 3,5
IKK 6	Meningkatnya profesionalitas dan kualitas layanan pengawasan	• Nilai praktik profesional, peran dan layanan pada kapabilitas APIP Itjen
Kegiatan : Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran Yang Berindikasi KKN (ITVES)		
IKK 7	Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	• Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti
IKK 8		• Jumlah Unit Kerja KLHK Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) (Kumulatif)





Rapat Kerja Teknis Pengawasan Tahun 2023

B. Rencana Kerja

Kementerian KLHK mempunyai prioritas nasional yang harus dicapai dan diinternalisasikan ke dalam pembangunan LHK.



No	Prioritas Nasional	Pembangunan LHK
PN.1	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ketahanan air untuk mendukung faktor-faktor pertumbuhan ekonomi, utamanya di wilayah hulu Meningkatkan nilai tambah dan daya saing industri pengolahan dan destinasi wisata
PN.2	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> Membantu menyiapkan Ibu Kota Nusantara (IKN)
PN.3	Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> Membantu mengentaskan kemiskinan melalui perluasan perhutanan sosial, tanah objek reforma agraria dari kawasan hutan, peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dan pendidikan vokasi pada sekolah kejuruan
PN.4	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Meningkatkan ketahanan bencana dan iklim



KEBIJAKAN PKPT INSPEKTORAT JENDERAL

Dalam rangka mendukung pencapaian pembangunan LHK, Inspektorat Jenderal melakukan langkah strategis dalam pengawasan intern tahun 2023. Pengawasan intern dilakukan melalui kegiatan *assurance* dan *consulting* atas pelaksanaan tugas fungsi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), penguatan manajemen risiko dan sistem pengendalian intern maka Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal Tahun 2023 diarahkan pada:

ASSURANCE (PENJAMINAN KEPERCAAYAAN)



- Audit Kinerja berbasis risiko
- Reviu dan evaluasi, termasuk reviu mandatori
- Audit Tematik Perijinan, pengelolaan PNBK, Pengelolaan SDM, UUCK, RHL
- Probity Audit
- Penjaminan tematik pro-aktif hasil data analytic berbasis digital

PENGUATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MANAJEMEN RISIKO



- Pendampingan penguatan SPIP dan edukasi manajemen risiko
- Penilaian mandiri Reformasi Birokrasi, Maturitas SPIP dan SAKIP

PENCEGAHAN KORUPSI DAN PENANGANAN RISIKO FRAUD



- Edukasi dan penilaian mandiri WBK/WBBM
- Pengembangan whistleblowing system
- Monitoring Roadmap pencegahan korupsi

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal merupakan komitmen Inspektur Jenderal dengan Menteri LHK yang ditandatangani bulan Desember 2022 untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan target yang ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :



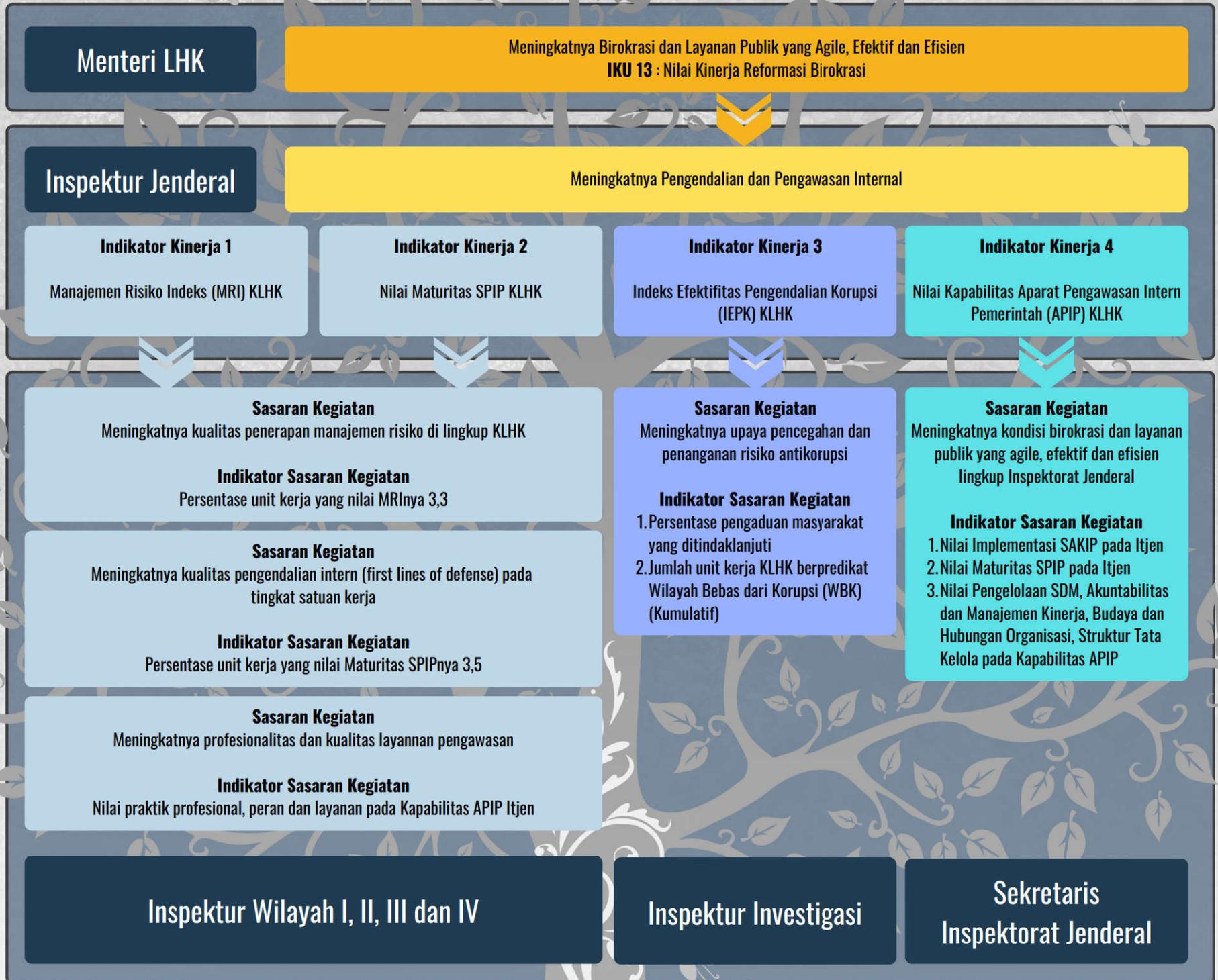
Indikator Kinerja Program (IKP) tersebut dijabarkan menjadi Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang menjadi tanggung jawab Pejabat Eselon II lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian LHK. IKK tersebut terdiri dari :

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target
a.	Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK Nilai kapabilitas SPIP KLHK Nilai Kapabilitas aparat Pengawas intern pemerintah (APIP) KLHK Nilai Sistem akuntabilitas Kinerja Korupsi (IEPK) KLHK 	<p>3 Poin</p> <p>3,3 Poin</p> <p>3,3 Poin</p> <p>3 Poin</p>
b.	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal 	85 Poin

PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET TAHUN 2023
Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang <i>agile</i> , efektif, dan efisien lingkup Inspektorat Jenderal	<ul style="list-style-type: none"> NILAI IMPLEMENTASI SAKIP ITJEN NILAI MATURITAS SPIP ITJEN NILAI PENGELOLAAN SDM, AKUNTABILITAS DAN MANAJEMEN KINERJA, BUDAYA DAN HUBUNGAN ORGANISASI, STRUKTUR TATA KELOLA PADA KAPABILITAS APIP 	<p>85 POIN</p> <p>3,5 POIN</p> <p>3,5 POIN</p>
Meningkatnya kualitas penerapan manajemen risiko di lingkup KLHK	<ul style="list-style-type: none"> PERSENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MRINYA 3,3 	75 %
Meningkatnya kualitas pengendalian intern (<i>first lines of defense</i>) pada tingkat satuan kerja	<ul style="list-style-type: none"> PERSENTASE UNIT KERJA YANG NILAI MATURITAS SPIPNYA 3,5 NILAI PRAKTIK PROFESIONAL, PERAN DAN LAYANAN PADA KAPABILITAS APIP ITJEN 	<p>50 %</p> <p>3,5 POIN</p>
Meningkatnya upaya pencegahan dan penanganan risiko korupsi	<ul style="list-style-type: none"> PERSENTASE PENGADUAN MASYARAKAT YANG DITINDAKLANJUTI JUMLAH UNIT KERJA KLHK BERPREDIKAT WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) (KUMULATIF) 	<p>100 %</p> <p>18 SATKER</p>

POHON KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL





Pelaksanaan Itjen Healty Day yang melibatkan APiP dari Kementerian/Lembaga lainnya untuk sharing santai

AKUNTABILITAS KINERJA



#BersihMelayaniMemberiSolusi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk melihat capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2023 dan pengukuran per triwulan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, maka dilakukan pengukuran dan analisis capaian kinerja.

Berdasarkan Permenpan dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah lampiran 2, pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Dengan begitu capaian kinerja Inspektorat Jenderal diukur dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Inspektorat Jenderal.

Untuk target-target yang tidak dapat diukur capaian kinerjanya per triwulan, maka yang diukur adalah kemajuan/progress dengan melihat pembobotan dari komponen kegiatan dan tahapan kegiatan.

Capaian kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK Tahun 2023 berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Program dibandingkan dengan target dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut :



TARGET DAN REALISASI INSPEKTORAT JENDERAL

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Tahun 2023	Progres Capaian Target Tahun 2024
MENINGKATNYA PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL				
• Manajemen Risiko Indeks (MRI) KLHK	3 Poin	3,66 Poin	122 %	111 %
• Nilai Maturitas SPIP KLHK	3,3 Poin	3,70 Poin	112 %	106 %
• Nilai Indeks Efektifitas Pengendalian Korupsi (IEPK) KLHK	3 Poin	3,52 Poin	117 %	108 %
• Nilai Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) KLHK	3,3 Poin	3,73 Poin	113 %	107 %
MENINGKATNYA AKUNTABILITAS KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL				
• Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal	85 Poin	82,23 Poin	97 %	96 %

Fokus Penilaian	Hasil Penilaian Mandiri Maturitas SPIP Terintegrasi Tahun 2023	Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Tahun 2023	Hasil Evaluasi Tim BPKP
Nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP	4,502	4,494	3,70
Manajemen Resiko Indeks (MRI)	4,51	4,51	3,66
Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	3,61	3,51	3,52



**MANAJEMEN RISIKO
INDEKS (MRI)
KEMENTERIAN LHK**



**NILAI MATURITAS
SPIP
KEMENTERIAN LHK**



**NILAI INDEKS EFEKTIFITAS
PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK)
KEMENTERIAN LHK**

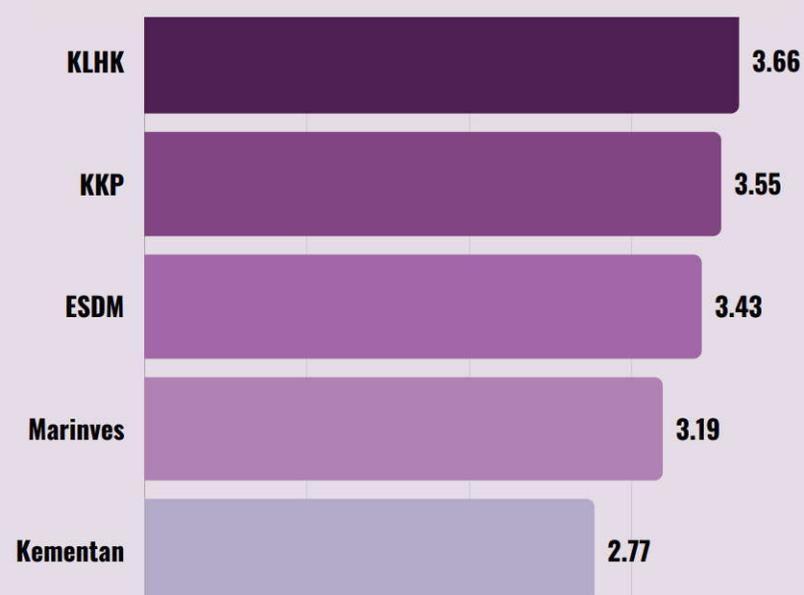


Pembibitan di Persemaian Modern

KOMPONEN PENILAIAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) KEMENTERIAN LHK

Area / Komponen	Bobot	Skor	Nilai
Perencanaan	0,400		1,60
• Kualitas Perencanaan	0,400	3,95	1,60
Kapabilitas	0,300		0,94
• Kepemimpinan	0,050	3,06	0,15
• Kebijakan Manajemen Risiko	0,050	3,00	0,15
• Sumber Daya Manusia	0,050	3,25	0,18
• Kemitraan	0,025	3,00	0,08
• Proses Manajemen Risiko	0,125	3,03	0,38
Hasil	0,300		1,12
• Aktivitas Penanganan Risiko	0,188	3,00	0,56
• Outcomes	0,113	5,00	0,56

BENCHMARK NILAI MRI KEMENTERIAN LHK DENGAN KEMENTERIAN LAIN*



*Sumber : BPKP

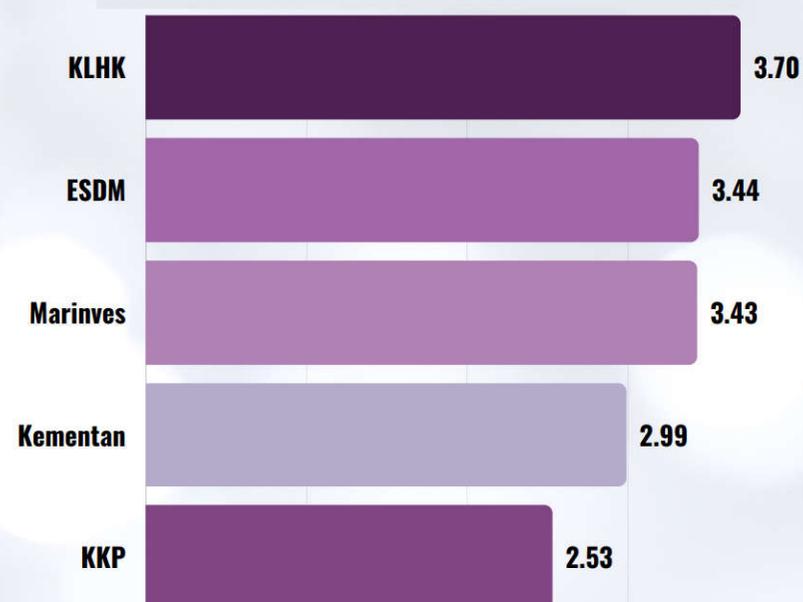
Berdasarkan hasil evaluasi atas Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP KLHK Tahun 2023 oleh BPKP didapatkan nilai untuk MRI sebesar 3,66 atau telah memenuhi karakteristik MRI pada level 3 (*defined*) yaitu kerangka penilaian/tanggapan umum terhadap risiko mulai teratur. Pemimpin eksekutif memberi pandangan terhadap risiko yang dihadapi organisasi secara keseluruhan. Pelaksanaan rencana diimplementasikan dengan memprioritaskan risiko yang tinggi.



KOMPONEN PENILAIAN NILAI MATURITAS SPIP KEMENTERIAN LHK

Area / Komponen	Bobot	Skor	Nilai Komponen
Penetapan Tujuan	0,400	4,00	1,60
Struktur dan Proses	0,300	3,393	1,018
Pencapaian Tujuan	0,300	3,600	1,080

BENCHMARK NILAI MATURITAS SPIP KEMENTERIAN LHK DENGAN KEMENTERIAN LAIN*



*Sumber : BPKP

Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP berdasarkan hasil evaluasi adalah 3,50 poin atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada leve 3 (terdefinisi) nilai ini menunjukkan bahwa organisasi telah mampu mengelola kinerjanya dengan baik.

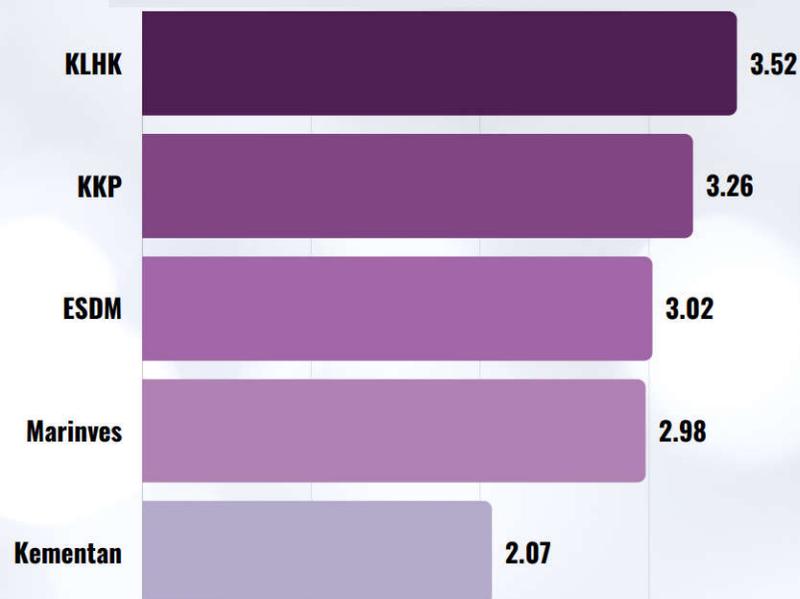


Naik 0,2 poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu 3,50 poin

KOMPONEN PENILAIAN INDEKS EFEKTIFITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) KEMENTERIAN LHK

Area / Komponen	Bobot	Skor	Nilai
Kapabilitas Pengelolaan Risiko Korupsi	0,480		1,85
• Kebijakan Antikorupsi	0,096	4,00	0,38
• Seperangkat Sistem Antikorupsi	0,072	3,00	0,22
• Dukungan Sumber Daya	0,072	4,00	0,29
• Power (Kuasa & Wewenang)	0,144	4,00	0,58
• Pembelajaran Antikorupsi	0,096	4,00	0,38
Penerapan Strategi Pencegahan	0,360		1,19
• Asesmen dan Mitigasi Risiko Korupsi	0,090	3,00	0,27
• Saluran Pelaporan Internal yang Efektif dan Kredibel	0,036	4,00	0,14
• Kepemimpinan Etis	0,090	3,00	0,27
• Integritas Organisasional	0,072	3,00	0,22
• Iklim Etis Prinsip	0,072	4,00	0,29
Penanganan Kejadian Korupsi	0,160		0,48
• Investigasi	0,080	3,00	0,24
• Tindakan Korektif	0,080	3,00	0,24

BENCHMARK NILAI IEPK KEMENTERIAN LHK DENGAN KEMENTERIAN LAIN*



*Sumber : BPKP

Nilai indeks efektifitas pengendalian korupsi (IEPK) berdasarkan hasil evaluasi adalah 3,52 poin



Naik 0,3 poin dari nilai tahun sebelumnya yaitu 3,22



Tiga satuan kerja KLHK penerima predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

3,73
POIN

+0,26

Naik **0,26** poin
dari nilai tahun
sebelumnya yaitu
3,47 poin

Nilai kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal KLHK Tahun 2023 sebesar 3,73 poin atau telah memenuhi karakteristik level 3 (*delivered*) nilai ini menunjukkan APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini dan peningkatan SDM yang memadai.

**NILAI KAPABILITAS
APARAT PENGAWASAN
INTERN PEMERINTAH
(APIP)
KEMENTERIAN LHK**



**KOMPONEN PENILAIAN
KAPABILITAS APARAT
PENGAWASAN INTERN
PEMERINTAH (APIP)
KEMENTERIAN LHK**

Elemen	Penilaian Mandiri 2023		Hasil Evaluasi 2023	
	Level	Skor	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan (Enabler) (60%)				
• Pengelolaan Sumber Daya Manusia (30%)	4	0,72	4	0,72
• Praktik Profesional (30%)	4	0,72	4	0,72
• Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja (10%)	4	0,24	3	0,23
• Budaya dan Hubungan Organisasi (10%)	4	0,24	3	0,18
• Struktur Tata Kelola (20%)	4	0,48	4	0,48
Komponen Aktivitas Pengawasan (Delivery) dan Kualitas Pengawasan (Result) (40%)				
• Peran dan Layanan	4	1,60	3	1,40
Simpulan Entitas	4	4,00	3	3,73

HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) INSPEKTORAT JENDERAL

Komponen	Bobot	Skor
PERENCANAAN KINERJA	30	24,21 Poin
PENGUKURAN KINERJA	30	26,55 Poin
PELAPORAN KINERJA	15	13,05 Poin
EVALUASI INTERNAL	25	18,42 Poin

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Inspektorat Jenderal pada tahun 2022 memperoleh nilai sebesar **82,23** dengan **kategori A (memuaskan)**. Nilai ini berarti bahwa entitas unit kerja Inspektorat Jenderal dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan setidaknya sampai ke level eselon 4/pengawas/subkoordinator

+0,79

Naik 0,79 poin
dari nilai tahun
sebelumnya yaitu
81,44 poin

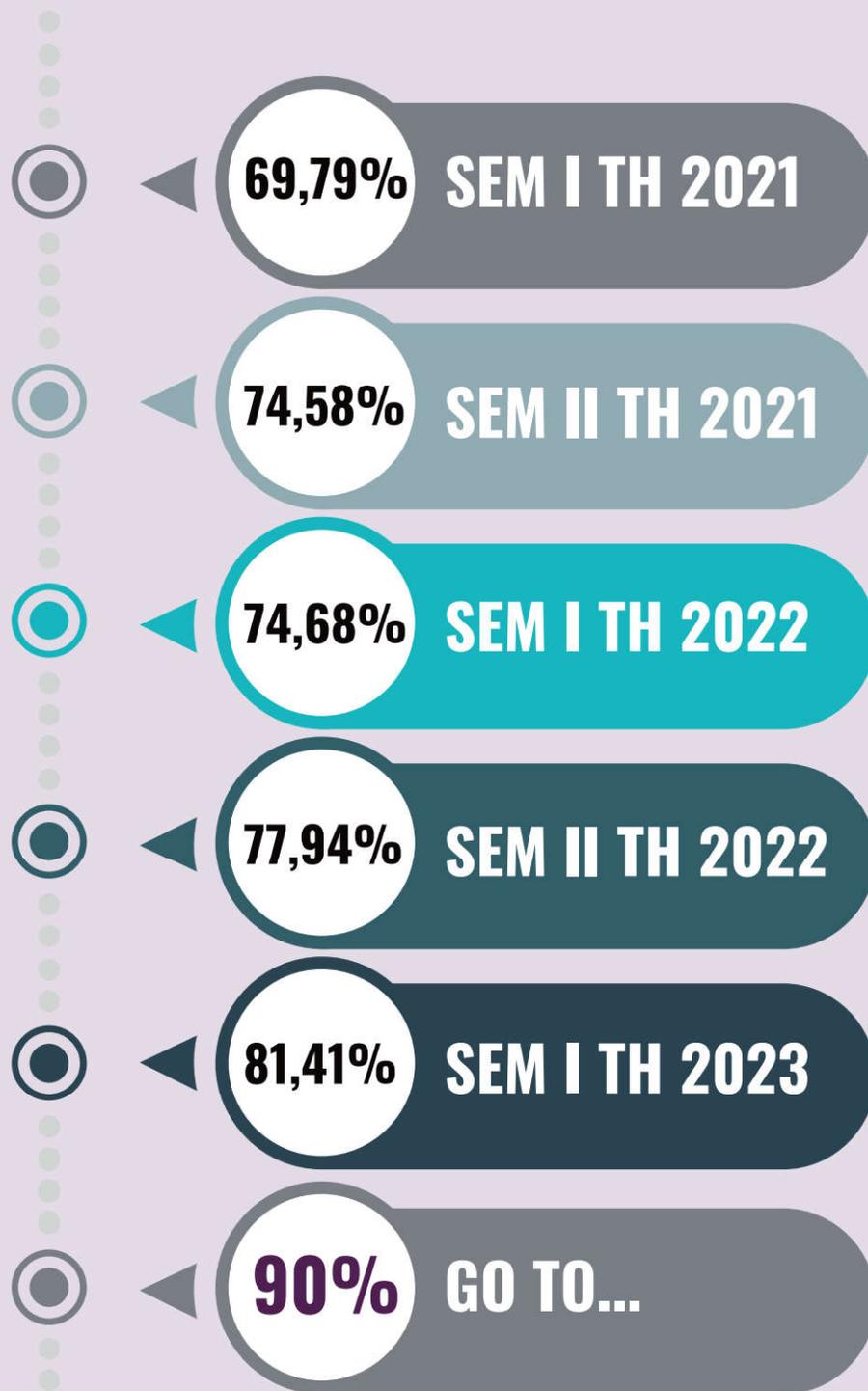
82,23
POIN

**NILAI SISTEM
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP)
INSPEKTORAT JENDERAL**



B. Kegiatan Strategis Inspektorat Jenderal

TINDAK LANJUT REKOMENDASI PEMERIKSAAN BPK RI KEMENTERIAN LHK

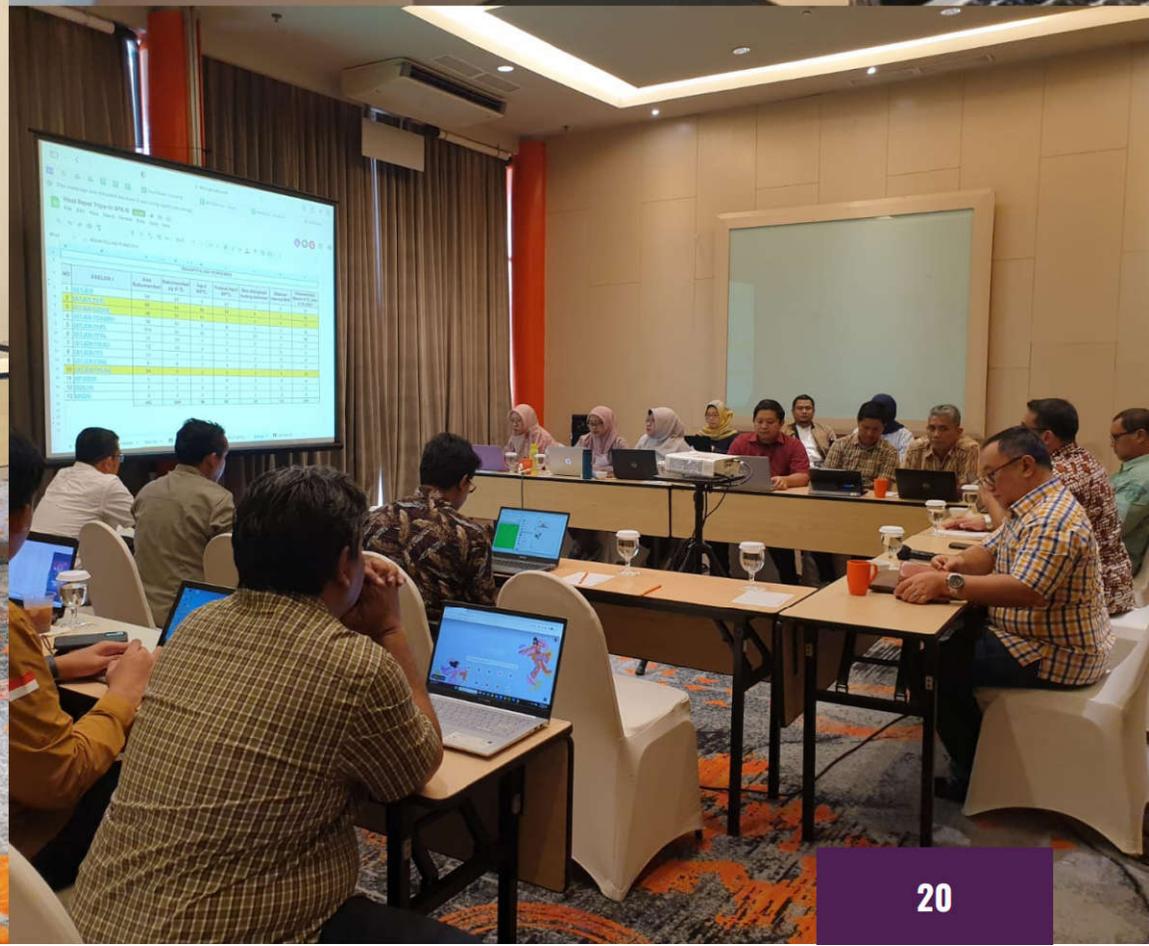


Capaian Penyelesaian
Tindak Lanjut
Rekomendasi





*Rapat Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan BPK RI*



WEBINAR SERIES

Selain melakukan kegiatan pengawasan internal lingkup Kementerian LHK, pada tahun 2023 Inspektorat Jenderal juga melakukan kegiatan edukasi terhadap pegawai Kementerian LHK maupun masyarakat umum melalui webinar series yang mengangkat tema-tema menarik dan aktual.

SCAN ME!



Better Speaker For Better Future (Membangun Branding Organisasi Melalui Komunikasi)

Tanggal pelaksanaan : 2 Maret 2023

Jumlah peserta : 680 orang

Narasumber :

- Dr Agung Solihin (Konsultan Budaya Organisasi);
- Listiani Aslin, S.E., MBA., CBA., CMHA., QIA., QHIA (Professional Speaker)

SCAN ME!



Semua Peduli, Semua Terlindungi (Privacy dan Keselamatan Perempuan dan Anak)

Tanggal pelaksanaan : 9 Maret 2023

Jumlah peserta : 250 orang

Narasumber :

- Shahnaz Haque (Public Figure, Aktivist Perempuan);
- Joice Manurung (Psikolog)

SCAN ME!



Health Talk : Get Healthy is So Eazy

Tanggal pelaksanaan : 30 Maret 2023

Jumlah peserta : 361 orang

Narasumber :

- Kurniawan Satria Denta (Pegiat Edukasi Kesehatan);
- Irma Gustiana A. (Psikolog)

SCAN ME!



Membangun Public Trust Melalui Integritas dan Profesionalitas Pelaku PBJ

Tanggal pelaksanaan : 6 April 2023

Jumlah peserta : 614 orang

Narasumber :

- Khalid Mustafa, S.T., M.Kom, CCMs, CMC (Procurement Advisor);
- Samidi (Plt. Kepala Biro Umum KLHK);
- Ade Tri Ajikusumah (Inspektur Wilayah IV)

**SCAN
ME!**



Transformer : Lahirnya Pejabat Fungsional Agile dan Adaptif (Aktualisasi dalam Manajemen Risiko Organisasi)

Tanggal pelaksanaan : **13 Juli 2023**

Jumlah peserta : **3977 orang**

Narasumber :

- Aba Subagja (Asdep Perancangan Jabatan, Perencanaan & Pengadaan SDM – KemenPANRB)
- Rhesa Darajat (Pengendali Dampak Lingkungan Dit. PKEG - Ditjen PPKL)
- Lia Yunita (PEH BPHL Wilayah IX Banjarbaru - Ditjen PHL)
- Fajar Perdana Rizki (Polhut BPPHLK Wilayah Sumatera - Ditjen Gakkum)
- Rudi Windra (Manggala Agni Daops X Kalimantan Ketapang)
- Abu Bakar Assegaf (Biro Kepegawaian dan Organisasi KLHK)
- Annisa Ayu Fawzia (Pengawas Lingkungan Hidup Dit. PPSA Ditjen Gakkum)

**SCAN
ME!**



INSIGHT "INSpirasi Gaya Hidup berintegritas"

Tanggal pelaksanaan : **10 Agustus 2023**

Jumlah peserta : **1105 orang**

Narasumber :

- Andi, S.H., M.M. (Asisten Muda Ombudsman Republik Indonesia, Keasistenan Utama Manajemen Pencegahan Maladministrasi);
- Leonita (Kepala Satgas Penanganan Laporan dan Pengaduan Masyarakat, KPK)

**SCAN
ME!**



Mitigasi dan Deteksi Risiko Fraud PBJ - Pembelajaran dari Kementerian PUPR

Tanggal pelaksanaan : **15 Juni 2023**

Jumlah peserta : **427 orang**

Narasumber :

- Binsar H. Simanjuntak (Staf Khusus Kementerian PUPR)

**WEBINAR
SERIES**

**SCAN
ME!**



Integritas di jiwaku, Netralitas ASN yang Ku Mau

Tanggal pelaksanaan : **30 November 2023**

Jumlah peserta : **1343 orang**

Narasumber :

- Nanang Priyatna (Inspektur Utama KPU)
- Rury Citra Diani (Direktur Pengawasan dan Pengendalian III, BKN)

**SCAN
ME!**



Jabatan Fungsional Optimal dan Berintegritas, Capaian Kinerja Maksimal

Tanggal pelaksanaan : **7 Desember 2023**

Jumlah peserta : **2176 orang**

Narasumber :

- Syamsul Rizal (Analisis Kebijakan Ahli Madya - KEMENPANRB)
- Djati Witjaksono H. (Analisis Kebijakan Utama - KLHK)

FORESIGHT PERSEMAIAN PERMANEN

Berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo bahwa Indonesia berkomitmen dalam menghadapi perubahan iklim dan memperbaiki lingkungan yang rusak melalui program persemaian permanen. Pengelolaan persemaian tersebut dimandatkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan c.q. Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan.

Sampai dengan Tahun 2023, Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan mengelola sebanyak 54 unit persemaian permanen, telah terbangun 6 unit pusat persemaian/persemaian skala besar, dan 3 unit pusat persemaian masih dalam proses baik melalui pendanaan APBN, maupun kerja sama dengan Kementerian PUPR, serta BUMN atau pihak Swasta.

Salah satu fungsi Inspektorat Jenderal adalah pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kegiatan yang bersifat asurans, konsultansi dan antisipatif. Pengawasan intern bersifat antisipatif yaitu pengawasan intern dalam bentuk pemberian input strategis kepada Menteri dan/atau Eselon I dengan orientasi risiko masa depan yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan KLHK berdasarkan analisis data dan hasil pengawasan intern. Pengawasan intern bersifat antisipatif yang kemudian dikenal dengan istilah Foresight yaitu suatu kerangka kerja sistematis untuk membantu para pembuat kebijakan agar mampu menangani isu-isu kompleks dengan dasar pemahaman yang komprehensif terhadap peluang-peluang dan tantangan-tantangan pembangunan di masa depan.

Foresight dilakukan sebagai salah satu metode untuk menata masa depan pengelolaan persemaian, sehingga mampu memberikan jawaban bagaimana kondisi pengelolaan persemaian beberapa tahun kedepan menuju tahun 2030.



TOTAL
Luas Persemaian : 474,03 Ha
Luas Lahan Kritis : 11.518,4 Ha
Target Produksi Per Tahun : 238 juta batang
ASN : 995 Orang

No	Provinsi	BPDAS	Luas (Ha)	Luas Lahan Kritis (Ha)	Target Produksi / Tahun (juta batang)	Jumlah SDM (ASN)
1	Aceh	Krueng Aceh	10	334,423	10	31
2	Sumatera Utara	Wampu Sei Ular	37,25	248,886	5	30
3	Sumatera Barat	Agam Kuantan	10,44	151,125	10	38
4	Riau	Indragiri Rokan	10	725,351	10	39
5	Kep. Riau	Sei Jang Duriangkang	6	92,573	5	30
6	Jambi	Batanghari	13,1	257,503	5	36
7	Bengkulu	Ketahun	10	274,616	5	31
8	Sumatera Selatan	Musi	14,76	722,28	10	36
9	Bangka Belitung	Baturusa Cerucuk	5	167,065	5	29
10	Lampung	Way Seputih Sekampung	10	392,366	10	46
11	Kalimantan Barat	Kapuas	10	716,396	15	32
12	Kalimantan Tengah	Kahayan	10	486,401	15	28
13	Kalimantan Utara	Mahakam Berau	10	327,706	5	40
14	Kalimantan Timur	Mahakam Berau	120	327,706	15	40
15	Kalimantan Selatan	Barito	10	819,799	10	30

RENCANA LOKASI (INDIKATIF) PEMBANGUNAN PUSAT PERSEMAIAN



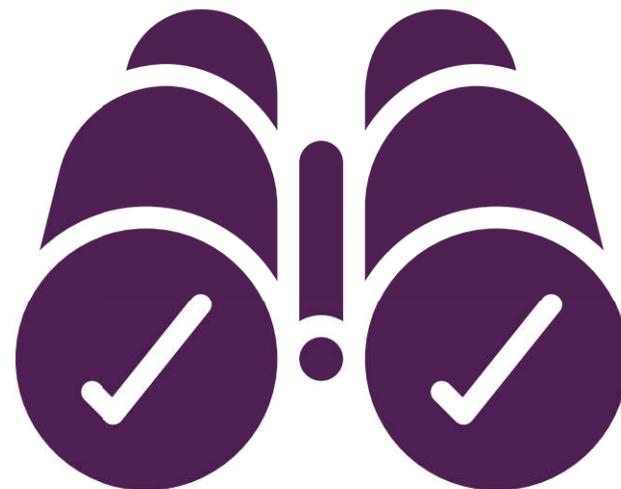
No	Provinsi	BPDAS	Luas (Ha)	Luas Lahan Kritis (Ha)	Target Produksi / Tahun (juta batang)	Jumlah SDM (ASN)
16	Jawa Barat	Citarum Ciliwung	8,85	814,543	8	43
17	Jawa Tengah	Pemali Jratun	12	146,768	5	50
18	Jawa Timur	Brantas Sampean	6,3	296,034	5	38
19	Nusa Tenggara Barat	Dodokan Moyosari	30	490,314	10	38
20	Nusa Tenggara Timur	Benain Noelmina	30	580,731	5	41
21	Sulawesi Barat	Karama	10	134,785	5	37
22	Sulawesi Selatan	Jeneberang Sadding	10	394,783	10	48
23	Sulawesi Tenggara	Sampara	10	312,535	10	39
24	Sulawesi Tengah	Palu Poso	10	373,177	10	24
25	Gorontalo	Bone Bolango	10	228,16	10	25
26	Sulawesi Utara	Tondano	30,33	359,942	5	22
27	Maluku Utara	Ake Malamo	5	483,268	5	25
28	Maluku	Wae Hapu Batu Merah	5	487,248	5	29
29	Papua Barat	Memberamo	5	361,404	5	27
30	Papua	Remu Ransiki	5	338,261	5	33



Benih tanaman di Persemaian Permanen

SKENARIO FORESIGHT PERSEMAIAN PERMANEN

Empat kemungkinan skenario dikembangkan berdasarkan telaah atas hasil pada tahap *horizon scanning* maupun hasil pengawasan internal maupun eksternal, utamanya terkait perbenihan/pembibitan dan persemaian sampai dengan tahun 2023. *Driving forces* yang memiliki dampak dan ketidakpastian paling tinggi dikerucutkan dan dikelompokkan ke dalam serangkaian *critical uncertainties*. Ketidakpastian yang teridentifikasi ditetapkan sebagai sumbu untuk menghasilkan kerangka yang membentuk empat skenario pengelolaan persemaian. Berikut adalah sejumlah karakteristik yang menggambarkan ciri-ciri dari empat kutub yang dihasilkan dari dua *driving forces* terpilih



Faktor – Faktor Yang Membentuk Dua Ketidakpastian Utama

Kurang Memadai

1. Alternatif pembiayaan pengelolaan persemaian kurang memadai
2. Program kemitraan antara pemerintah dan badan usaha/swasta kurang memadai
3. Belum adanya kolaborasi dan kerja sama yang efektif di antara pemerintah dan badan usaha
4. Sinergitas pemerintah dan swasta kurang memadai
5. Animo Masyarakat untuk berinvestasi rendah (prospektif berusaha)

Memadai

1. Hadirnya alternatif pembiayaan pengelolaan yang memadai
2. Program kemitraan antara pemerintah dan badan usaha/swasta memadai
3. Hadirnya kolaborasi dan kerja sama yang efektif diantara pemerintah dan badan usaha
4. Sinergitas pemerintah dan swasta memadai
5. Animo Masyarakat untuk berinvestasi tinggi (prospektif berusaha)

Dukungan Pembiayaan

Akuntabilitas Pengelolaan

Lemah

1. SDM pengelolaan persemaian skala besar belum memadai
2. Pedoman pengelolaan persemaian belum update
3. Produksi dan distribusi bibit tidak seimbang dan tidak berkelanjutan
4. Administrasi dan distribusi bibit kurang tertib
5. Pengadaan dan permintaan tidak seimbang (Procurement and demand are unbalanced)
6. Lemahnya akurasi data degradasi dan rehabilitasi kawasan hutan (kebutuhan bibit tidak dapat diprediksi secara akurat)

Kuat

1. SDM pengelolaan persemaian skala besar memadai
2. Pedoman pengelolaan persemaian telah tersusun dan efektif
3. Produksi dan distribusi bibit seimbang dan berkelanjutan
4. Administrasi dan Distribusi bibit tertib
5. Pengadaan dan permintaan seimbang (Supply and demand are balanced)
6. Kuatnya akurasi data degradasi dan rehabilitasi kawasan hutan (kebutuhan bibit dapat diprediksi secara akurat)

KAJIAN MANAJEMEN RISIKO INDONESIA'S FOLU NET SINK 2030

Indonesia's Folu Net Sink 2030 adalah komitmen Indonesia dalam pengendalian perubahan iklim dunia, Kegiatan tersebut merupakan sebuah program untuk mencapai tingkat emisi gas rumah kaca sebesar -140 juta ton CO2e pada tahun 2030. Dalam keberlanjutannya, diperlukan suatu manajemen risiko yang didukung dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko.

Kegiatan Penyusunan Kajian Manajemen Risiko Indonesia's FOLU Net Sink 2030 bertujuan untuk mendapatkan Kerangka Kerja Manajemen Risiko yang konsisten atas risiko yang ada terkait kegiatan Indonesia's FOLU Net Sink 2030 guna memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian sasaran. Manajemen risiko menjadi suatu keharusan pada seluruh unit kerja dalam rangka pencapaian sasaran atas penyelenggaraan negara di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

Kajian manajemen risiko disusun melalui serangkaian focus group discussion yang melibatkan bidang-bidang Indonesia's Folu Net Sink. Berdasarkan hasil identifikasi risiko, terdapat 10 (sepuluh) risiko strategis tingkat program yang dapat mempengaruhi keseluruhan kapasitas pelaksana, yaitu:

1. Inkoherensi langkah organisasi pelaksana
2. Ketidakberlanjutan program
3. Rendahnya validitas klaim pencapaian target
4. Diskontinuitas sumberdaya pelaksanaan program
5. Rendahnya validitas pengukuran karbon
6. Rendahnya penerimaan/partisipasi masyarakat di tapak
7. Insentif NEK tidak dapat diandalkan
8. Terjadi hambatan dalam pencegahan deforestasi
9. Disharmoni dalam kebijakan konservasi dan pemanfaatan SDA
10. Perubahan prioritas dalam periode pelaksanaan

Selain tingkat program, terdapat 52 (lima puluh dua) risiko strategis tingkat bidang yang dapat mempengaruhi kualitas pencapaian target, serta risiko lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas aktivitas pelaksanaan. Risiko tersebut kemudian dianalisis dan disusun keputusan mitigasi.





Tutupan Hutan Tropis di Kalimantan Barat

AUDIT REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN

Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang selanjutnya disingkat RHL adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktivitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Dalam pencapaian indikator kinerja program Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan, Direktorat Jenderal PDASRH menetapkan sasaran kinerja berupa Meningkatnya Tutupan Hutan dan Lahan pada Daerah Aliran Sungai dengan indikator kinerja Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi seluas 1.000.000 hektar pada akhir tahun 2024 yang diantaranya dilaksanakan melalui kegiatan rehabilitasi hutan.

Untuk memberikan penjaminan kualitas terhadap pelaksanaan RHL secara vegetatif tersebut, Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan internal melalui kegiatan audit tematik penyelenggaraan RHL yang diharapkan dapat memberikan nilai tambah atas pengendalian intern dan manajemen risiko penyelenggaraan RHL baik pada level operasional maupun level strategis. Adapun ruang lingkup Audit tematik RHL meliputi pengujian atas penyelenggaraan RHL secara vegetatif di kawasan konservasi, kawasan hutan lindung, atau hutan produksi, yang meliputi aspek perencanaan, penyediaan bibit, pelaksanaan penanaman dan pengawasan serta penilaian.

Berdasarkan kegiatan audit yang dilakukan, Inspektorat Jenderal memberikan saran perbaikan berupa rekomendasi untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan kegiatan RHL. sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan

- Melakukan bimbingan teknis secara berkala terkait pelaksanaan prakondisi RHL;
- Menyelesaikan penyusunan dokumen RTN-RH tahun 2024 yang belum tuntas;
- Menyusun Rencana Kerja RHL tahun 2024 yang clear and clean setelah melaksanakan rencana aksi yang memuat prakondisi lapangan dan pembentukan kelembagaan yang efektif.

2. Aspek Penyediaan Bibit

- Pelaksana swakelola agar menyusun analisis kemampuan penyediaan bibit RHL yang direviu oleh PPK;
- Melakukan pemeliharaan secara intensif terhadap bibit yang telah diproduksi dan melaporkannya secara berkala;
- Melakukan perhitungan kembali kebutuhan bibit untuk kegiatan RHL dengan mempertimbangkan toleransi risiko kerusakan/kematian bibit pada saat distribusi dari persemaian ke lokasi penanaman;
- Menyusun rencana aksi yang menganalisis rencana Supply/produksi bibit dari seluruh persemaian dengan kebutuhan bibit untuk kegiatan RHL secara vegetatif dan rencana distribusi kepada masyarakat;
- Menyusun rencana aksi penyediaan bibit yang memuat antara lain mekanisme penyediaan bibit yang belum diproduksi pada persemaian, tata waktu dan pemeliharaan bibit yang sudah diproduksi.

3. Aspek Pelaksanaan

- Menyusun rencana aksi pengendalian atas pelaksanaan RHL melalui swakelola yang memuat Langkah-langkah konkret terkait:
 - 1) Pencapaian target keberhasilan tanaman;
 - 2) Tertib pelaksanaan fisik tahapan kegiatan RHL berdasarkan RK-RHL;
 - 3) Peningkatan intensitas monitoring terhadap seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan RHL;
 - 4) Tertib penyampaian laporan pelaksana swakelola.
- Melakukan monitoring terhadap penanaman swadaya yang dilakukan kelompok pelaksana swakelola RHL, penyedia, Direktorat Jenderal PDASRH dan APIP;
- Memberikan surat peringatan kepada penyedia RHL yang tidak mencapai target dan selanjutnya melakukan pembahasan untuk mengambil langkah-langkah yang tepat dan memadai untuk mengejar target keberhasilan RHL dengan tercapainya tanaman hidup minimal 75%;
- Menyusun SOP internal pelaksanaan geotagging atas hasil pelaksanaan RHL di masing-masing satuan kerja.



4. Aspek Pengawasan dan Penilaian

- PPK agar melakukan monitoring secara intensif terhadap pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penilaian (Waslai) RHL Tahun 2023 dan menyusun checklist kegiatan Waslai sesuai dengan tahapan dan ruang lingkup masing-masing pekerjaan yang tertuang dalam kontrak;
- PPK agar memberikan bimbingan teknis secara berkala kepada kelompok tani pelaksana swakelola terkait tugas dan tanggung jawab sebagai tim pengawas swakelola, serta memerintahkan tim pengawas swakelola untuk menyusun laporan hasil pengawasan secara periodik.
- Memerintahkan tim pengawas untuk tertib dalam menyampaikan laporan hasil pengawasan secara berkala, yaitu secara mingguan, bulanan dan tahunan.

Dalam perspektif pengawasan kami selaku Aparat Pengendalian Intern Pemerintah atau APIP, Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah program yang dibebani oleh target sangat “mulia”, yaitu mampu memulihkan lahan kritis seluas lebih dari 5 juta hektar. Tidak hanya dari segi kuantitas yang besar, tetapi magnitude manfaatnya juga luas di dalamnya mulai dari target penyelesaian konflik tenurial, target peningkatan kesejahteraan masyarakat, target keberlanjutan ekosistem hutan, dan bahkan target penurunan emisi gas rumah kaca. Kompleksnya ekspektasi capaian dari program ini, menyebabkan kami sangat menekankan koridor pengelolaan risiko sebagai platform pengawasan dan pengembangan sistem pengendaliannya.

Semoga kedepannya RHL dapat berjalan dengan kesadaran penuh kita semua melangkah terhadap pemahaman persepsi risiko yang kuat dan ketepatan melakukan langkah antisipasi mitigasi risiko sehingga tercapai keberlanjutan kelestarian hutan dan kesejahteraan Masyarakat.



Pelaksanaan Audit Rehabilitasi Hutan dan Lahan

AUDIT PERIZINAN KEMENTERIAN LHK

Pada tahun 2023, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan kegiatan audit tematik perizinan lingkup Kementerian LHK. Kegiatan tersebut bertujuan untuk :

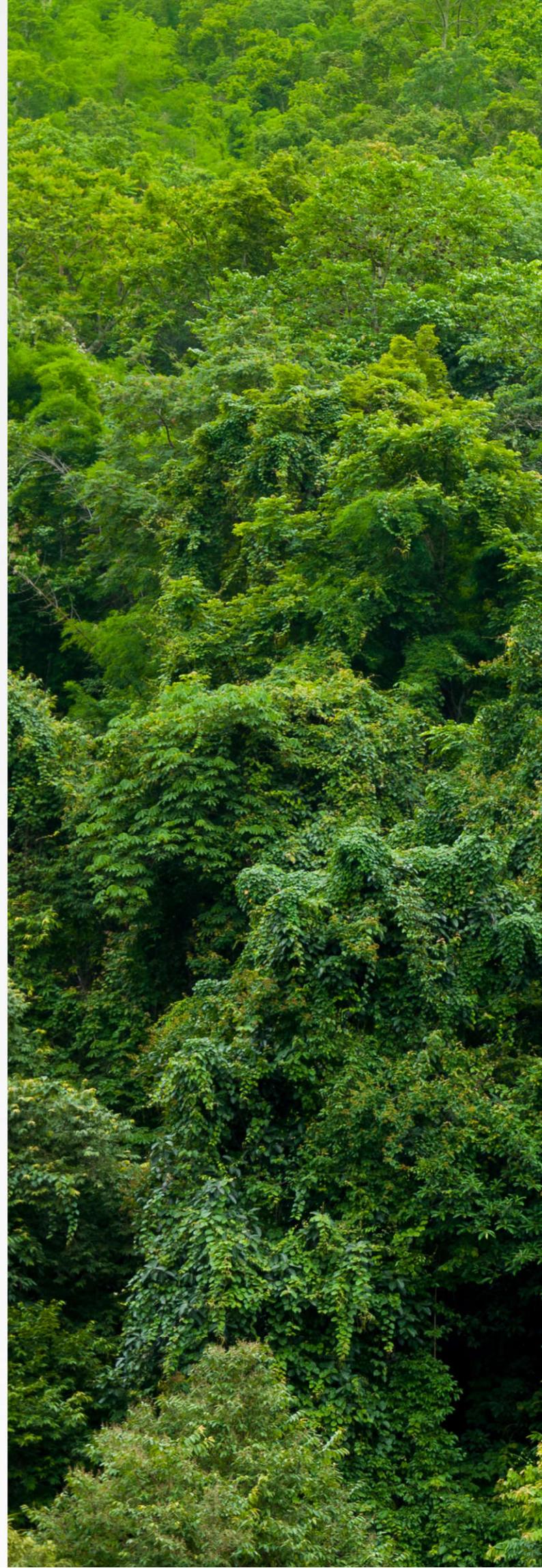
1. Memberikan keyakinan yang memadai atas penyelenggaraan perizinan lingkup Kementerian LHK telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengidentifikasi permasalahan/kesenjangan dalam penyelenggara perizinan lingkup Kementerian LHK;
3. Memberikan peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko pada penyelenggaraan perizinan lingkup Kementerian LHK;
4. Memastikan pengendalian internal risiko kecurangan/fraud penyelenggaraan perizinan lingkup Kementerian LHK telah memadai; dan
5. Memberikan rekomendasi perbaikan kinerja penyelenggaraan perizinan lingkup Kementerian LHK.

Lingkup perizinan yang menjadi objek audit antara lain:

1. penyelenggaraan Perizinan dan Persetujuan Bidang LHK;
2. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bidang Perbenihan Tanaman Hutan (PTH);
3. Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan;
4. Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan;
5. Perizinan Pengelolaan Limbah B3;
6. Perizinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan.

Berdasarkan pelaksanaan audit, secara umum diperoleh hasil antara lain sebagai berikut:

1. Perbaikan standar, mekanisme, prosedur dan transparansi pelayanan;
2. Menetapkan standar waktu pelayanan;
3. Pemanfaatan sistem informasi pelayanan perizinan;
4. Membuka layanan konsultasi dan pengaduan;
5. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana penunjang pelayanan.



AUDIT SDM KEMENTERIAN LHK

A. Tujuan Audit

- untuk mengevaluasi dan memastikan efektivitas, efisiensi, serta kepatuhan terhadap kebijakan dan peraturan dalam pengelolaan sumber daya manusia di sektor public;
- tujuan utama dari audit manajemen PNS adalah meningkatkan kualitas, integritas, dan kinerja PNS serta memastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia di sektor publik sesuai dengan standar yang ditetapkan dan menghasilkan hasil yang optimal untuk masyarakat dan pemerintah.

B. Ruang lingkup audit manajemen PNS

- Kebijakan dan prosedur manajemen PNS;
- Proses rekrutmen dan seleksi PNS;
- Pengembangan karier;
- Penilaian kinerja; dan
- Sistem penggajian dan tunjangan



Dari kegiatan audit tersebut, Inspektorat Jenderal merekomendasikan

- Menyusun Dokumen Kebutuhan dan Rencana Pengembangan Kompetensi PNS Tahunan 2024 di masing-masing Satker
- Mengalokasikan anggaran rencana pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS yang telah disusun dalam RKA-KL tahun 2024
- Melakukan evaluasi pengembangan seluruh kompetensi untuk semua pegawai
- membuat dokumen Rencana Pengembangan Karier paling sedikit meliputi unsur-unsur Pola Karier pegawai sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil
- melakukan dialog kinerja untuk menetapkan dan mengklarifikasi Ekspektasi Kinerja seluruh pegawai lingkup satuan kerjanya.
- Pengelolaan kinerja pegawai seperti mengkaji dan mengevaluasi terkait analisis kebutuhan jabatan.

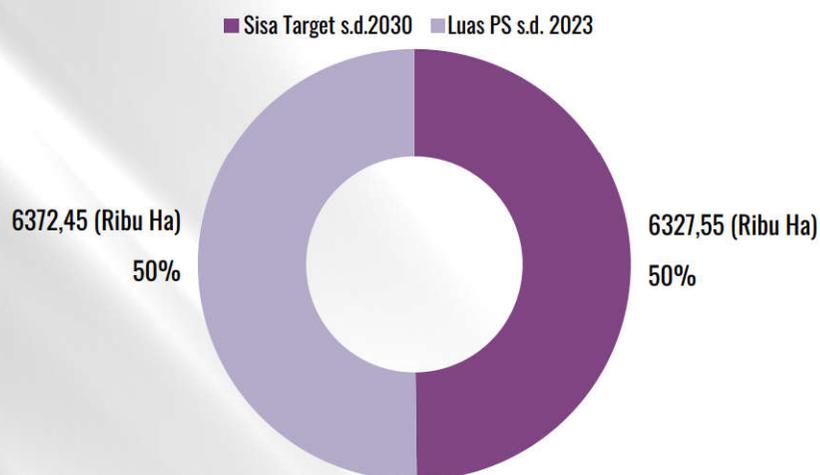
EVALUASI PERHUTANAN SOSIAL

Diklasifikasikan dalam 3 urutan kegiatan yaitu :

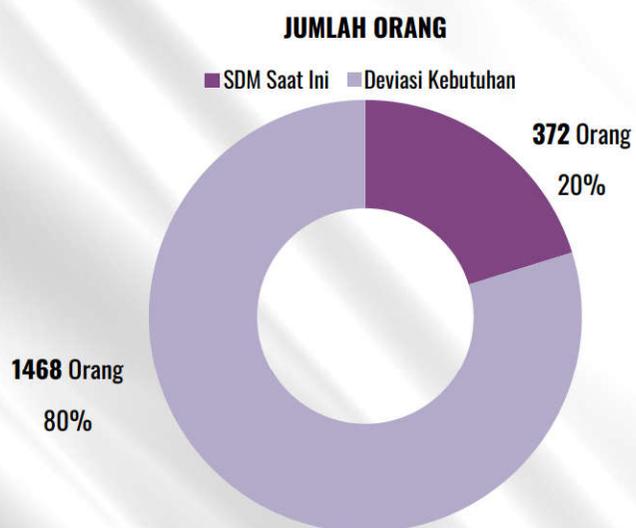
- 1.pertama terfokus pada tatanan norma dan kebijakan yang telah disusun Eselon 2 lingkup Ditjen PSKL yaitu Direktorat PKPS, Direktorat PUPS dan Direktorat Kemitraan Lingkungan.
- 2.kedua dilakukan melalui audit perizinan lingkup Ditjen PSKL, kegiatan yang bisa disebut kembar beda ibu dengan evaluasi PS level pusat.
- 3.ketiga yaitu evaluasi level tapak.

Dari hasil kegiatan tersebut ditemukan beberapa kelemahan, antara lain :

- Target luas perhutanan sosial berpotensi tidak tercapai



- Pedoman (NSPK) belum lengkap
- Kinerja pendamping tidak berpengaruh signifikan terhadap perkembangan perhutanan sosial
- Kebijakan dan standar pelayanan izin perhutanan sosial belum optimal
- Ketersediaan SDM lingkup Ditjen PSKL tidak sebanding dengan target kinerja yang diemban oleh Ditjen PSKL, sehingga terdapat beban kerja yang melebihi kapasitas

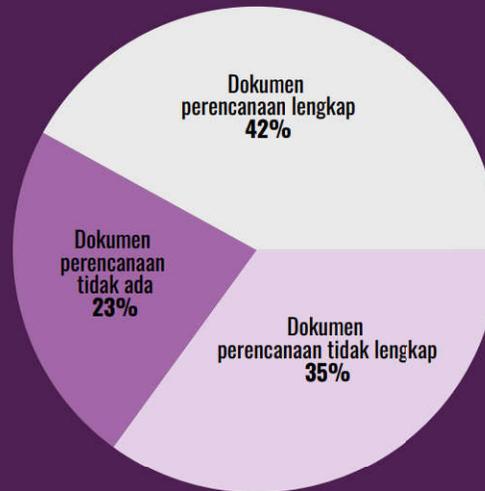


Penyerahan Sertifikat HKm dalam Festival LIKE

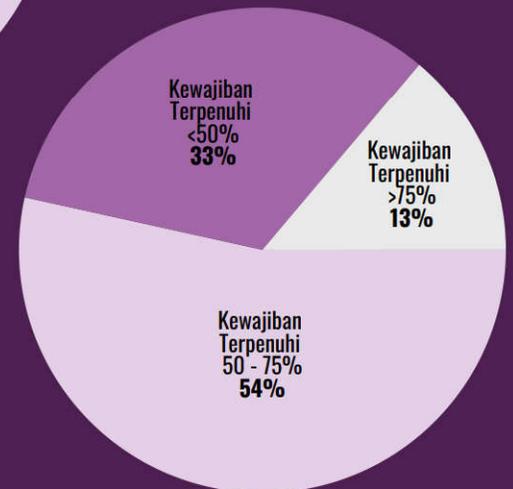


- Kebutuhan diklat dari personil lingkup Ditjen PSKL belum terpenuhi secara memadai.
- Penilaian terhadap pendamping yang existing pun belum terlalu nyata memberi dampak terhadap pengelolaan perhutanan sosial. Intervensi tenaga pendamping PS belum berkontribusi terhadap peningkatan capacity building KPS, fasilitasi dan mediasi antar kepentingan belum berjalan, dan informasi terkait mitra bisnis perhutanan sosial. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut yaitu kapabilitas tenaga pendamping masih terbatas, pelatihan yang diterima hanya sebatas pengisian data di GoKups dan penyusunan rencana kerja.

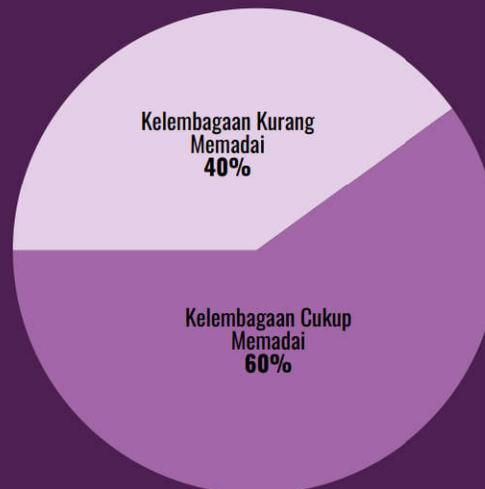
Parameter Perencanaan



Pemenuhan Kewajiban



Bentuk Kelembagaan



Penilaian Kelompok Usaha PS



C. Realisasi Anggaran

TOTAL PAGU ANGGARAN
Rp 84.567.871.000,-

Komponen/Kegiatan Pokok	Pagu Rp.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK	47.690.469.000,-
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK	30.747.391.000,-
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	6.130.011.000,-

Komposisi pagu anggaran berdasarkan **Kegiatan Pokok Program Dukungan Manajemen**

Jenis Belanja	Pagu Rp.
Belanja Pegawai	26.612.222.000,-
Belanja Barang	52.993.810.000,-
Belanja Modal	4.961.839.000,-

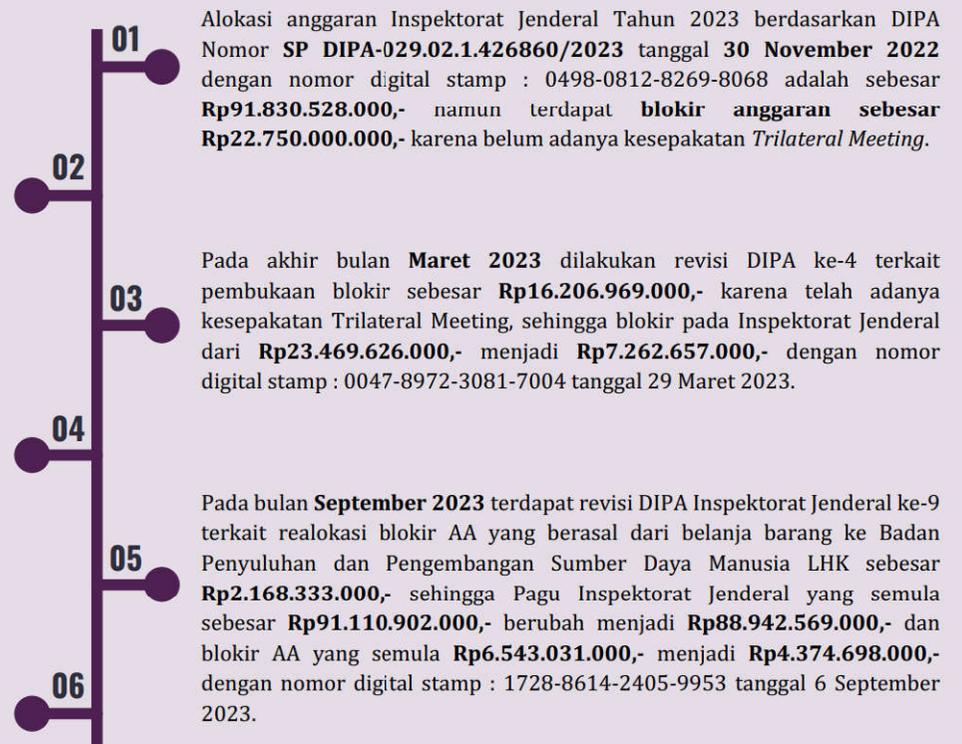
Komposisi pagu anggaran berdasarkan **Jenis Belanja**

PERJALANAN ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL

Pada bulan **Desember 2022** terdapat revisi DIPA terkait blokir *Automatic Adjustment* (AA) pada anggaran Inspektorat Jenderal sebesar **Rp7.262.657.000,-** yang terdiri dari AA belanja pegawai sebesar **Rp719.626.000,-** dan AA belanja barang sebesar **Rp6.543.031.000,-**. AA yang berasal dari belanja barang diambilkan dari blokir existing sehingga total blokir Inspektorat Jenderal dari **Rp22.750.000.000,-** menjadi **Rp23.469.626.000,-** dengan nomor digital stamp : 0028-6708-0188-7832 tanggal 22 Desember 2022.

Pada bulan **Juli 2023** terdapat revisi DIPA Inspektorat Jenderal ke-7 terkait realokasi blokir AA yang berasal dari belanja pegawai ke Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA-BUN) sebesar Rp719.626.000,- sehingga Pagu Inspektorat Jenderal yang semula Rp91.830.528.000,- menjadi Rp91.110.902.000,- dengan nomor digital stamp : 4403-8696-9900-0510 tanggal 17 Juli 2023.

Pada bulan **Oktober 2023** dilakukan revisi DIPA ke-11 terkait realokasi sisa blokir AA yang berasal dari belanja barang ke BA-BUN sebesar Rp4.374.698.000,- sehingga Pagu Inspektorat Jenderal yang semula sebesar Rp88.942.569.000,- berubah menjadi Rp84.567.871.000,- dengan nomor digital stamp : 4108-1307-4385-0395 tanggal 17 Oktober 2023.

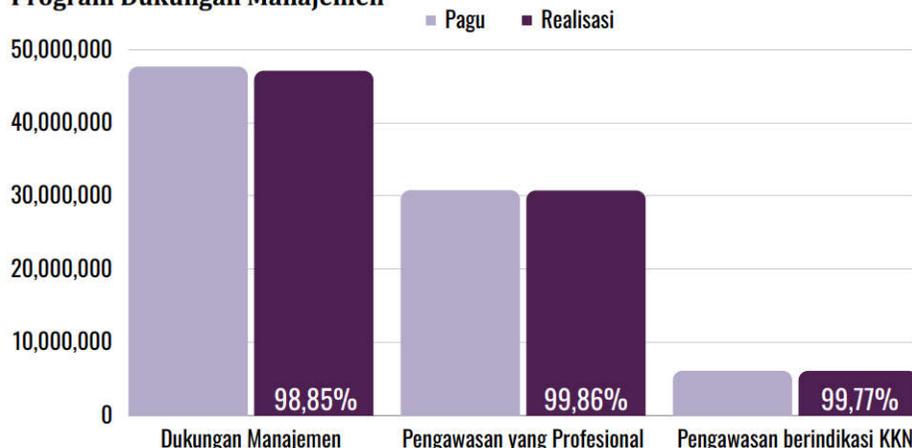


REALISASI ANGGARAN INSPEKTORAT JENDERAL

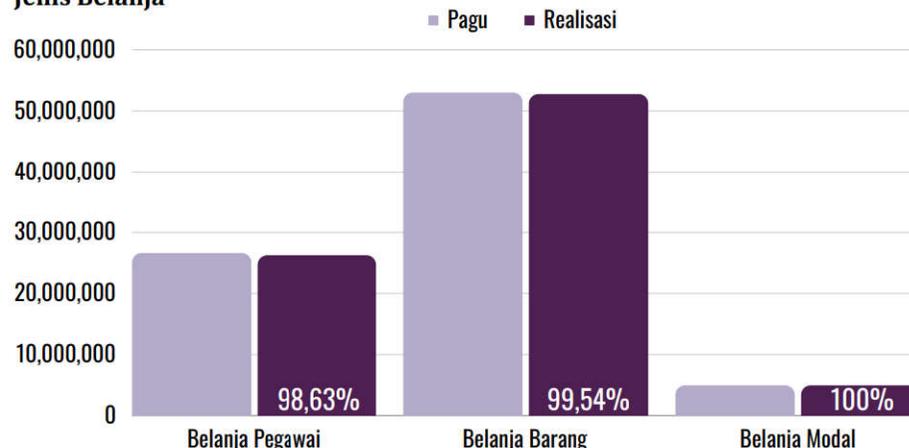
Komponen/Kegiatan Pokok	Realisasi Rp.	%
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Itjen KLHK	47.141.912.510,-	98,85%
Pengawasan yang Profesional Guna Menjamin Mutu Kinerja KLHK	30.704.071.967,-	99,86%
Pengawasan Terhadap Kasus Pelanggaran yang Berindikasi KKN	6.116.184.236,-	99,77%

Jenis Belanja	Realisasi Rp.	%
Belanja Pegawai	26.248.822.225,-	98,63%
Belanja Barang	52.751.533.580,-	99,54%
Belanja Modal	4.961.812.908,-	100,00%

Realisasi anggaran berdasarkan **Kegiatan Pokok Program Dukungan Manajemen**



Realisasi anggaran berdasarkan **Jenis Belanja**



TOTAL REALISASI ANGGARAN
Rp 83.962.168.713,-

Realisasi Anggaran
99,28%



Nilai Pemenuhan Target Kinerja
112%

Dalam pemenuhan nilai efisiensi dilihat dari nilai pemenuhan target kinerja dibandingkan dengan realisasi anggaran, diperoleh nilai efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Jenderal sebesar 1.13

Nilai Efisiensi
1.13



Inspektur Jenderal KLHK melakukan penanaman pohon pada Ruang Terbuka Hijau di Balaraja, Kab. Tangerang dalam acara penanaman pohon serentak seluruh Indonesia

PENUTUP



#BersihMelayaniMemberiSolusi

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

REALISASI KINERJA INSPEKTORAT JENDERAL 2023

- REALISASI **CAPAIAN MANAJEMEN RISIKO INDEKS (MRI) KLHK 3,62 POIN**
- REALISASI **CAPAIAN NILAI MATURITAS SPIP KLHK 3,67 POIN**
- REALISASI **CAPAIAN NILAI KAPABILITAS APARAT PENGAWAS INTERN PEMERINTAH (APIP) KLHK 3,73 POIN**
- REALISASI **CAPAIAN INDEKS EFEKTIVITAS PENGENDALIAN KORUPSI (IEPK) KLHK 3,52 POIN**
- REALISASI **CAPAIAN NILAI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ITJEN 82,23 POIN**
- REALISASI **PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2023 ADALAH 99,28% ATAU SEBESAR RP83,962,168,713,- DARI TOTAL ANGGARAN SEBESAR RP84.567.871.000,-**

*Panorama Puncak Gunung Pangrango, Taman
Nasional Gunung Gede Pangrango*

HAMBATAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

MASIH DIPERLUKAN **PENINGKATAN SISTEM PENGENDALIAN** TERHADAP PENGUMPULAN **BUKTI-BUKTI KEGIATAN** YANG MENDUKUNG PENINGKATAN **KAPABILITAS APIP**

MASIH ADA **GAP PERSEPSI** ANTARA TIM PENILAIAN DAN TIM PENINGKATAN **KAPABILITAS APIP**



Water Spray di Persemaian Modern

LANGKAH TINDAK LANJUT

Dalam langkah pencapaian target Indikator Kinerja Program Inspektorat Jenderal Tahun 2023 serta mengatasi permasalahan yang dihadapi, langkah-langkah yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK

- Untuk meningkatkan capaian Internal Audit Capability Model (IACM) Inspektorat Jenderal KLHK, maka akan dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung perindikoran penilaian, diantaranya penyusunan SOP pengendalian terhadap pelaksanaan pemantauan Kapabilitas APIP.
- Meningkatkan pemahaman dalam peningkatan kapabilitas APIP.
- Melaksanakan peningkatan anti korupsi/gratifikasi melalui pembangunan WBK/WBBM.
- Meningkatkan kompetensi SDM APIP.
- Meningkatkan koordinasi stakeholder dengan klien pengawasan serta stakeholder lainnya.
- Menetapkan kebijakan terkait manajemen risiko

SOSIAL MEDIA



<http://itjen.menlhk.go.id>



itjenklhk



Itjen KLHK



ItjenKlhk



Itjen Klhk



